

BAHAYA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KELURAHAN/DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :
AKBAR IBRAHIM
NIM : 10300114040

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Ibrahim

NIM : 10300114040

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Makassar, 26 Agustus 2018

Penulis

Akbar Ibrahim

NIM. 10300114040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **“BAHAYA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)”** yang disusun oleh Akbar Ibrahim NIM: 10300114040 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 M, bertepatan dengan 17 Jumadil-Ula 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Gowa, 24 Januari 2019 M
17 Jumadil-Ula 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	:	Dr. Abdi Wijaya, SS., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. H. Muammar Muh Bakri, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, **“BAHAYA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN/DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam dan salawat senantiasa dipanjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ummatnya dari jurang-jurang kehancuran menuju puncak kejayaan, Beliau lah yang berjuang demi satu kalimat “Laailahaillah”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Ibrahim tercinta yang selalu menjadi panutan penulis agar selalu bekerja keras sepertinya, yang telah banting tulang dalam mencari rezeki demi membiayai uang semester penulis dan kehidupan sehari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Makassar dan Ibunda Hj. Hasbiah tercinta, yang tak henti-hentinya memberi semangat dan tidak pernah merasa lelah mendoakan penulis siang dan malam agar dipermudah dalam mencapai gelar sarjana secepat mungkin.
2. Adik tercinta penulis Abbas oi, Abrar, As’ad, Aulia dan Ansar yang selalu memberikan support dan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. A. selaku Wakil Rektor II dan Ibu Prof. Siti Aisyah, M. A., Ph. D. selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Hamdan Juhanis, Ph. D selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Hamsir., S. H, M. H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag. selaku Wakil Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Muammar Bakri, Lc, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Achmad Musyahid, M. Ag selaku pembimbing II terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag selaku penguji I dan Bapak Dr. Abdi Wijaya, M. Ag selaku penguji II, atas segala bimbingan, arahan serta perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Rina Yanti Arifin yang selalu menemani, membantu, mensupport, memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi serta sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan studi

8. Sahabat dan Sahabatwati saya Khaidir, Ismail, Asmar, Garnadi, Jusran, Wawan, iyan, Nita, Fira, Suhartina Rustam, Sifa dan Ana serta sahabat/i yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Gowa terima kasih telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Teman kontrakan saya Ardi, Akbar, Adnan, Subandi dan Iccang terima kasih atas kebersamaannya selama ini
10. Keluarga besar kelas PMH angkatan 2014 yang kurang lebih 4 tahun penulis mengalami banyak kenangan bersama kalian.
11. Saudara seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini Alif Sultan terma kasih atas bantuan dan masukannya
12. Teman-teman KKN angkatan 58 Desa Kohala Fahrur, Suanto, Armita, Putri, Waru dan Asrida terima kasih telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
13. Teman-teman PPL PA Pare-Pare angkatan 2017

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Makassar, 26 Agustus 2018

Penulis

Akbar Ibrahim

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii-v
DAFTAR ISI	vi-vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii-xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	13
B. Tinjauan Mengenai Perkawinan di Bawah Umur (Pernikahan Dini).....	17
1. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam	17
2. Pernikahan Dini Menurut Hukum Nasional	21
C. Tinjauan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	24
1. Hak Bersama Suami Istri.....	24
2. Adab Suami dan Istri	24
3. Adab Istri Kepada suami	25
D. Macam-macam Wali	27
1. Wali Nasab	27
2. Wali Hakim	28
3. Wali Tahkim	28
4. Wali Maula	28

5. Wali Mujbir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrument Penelitian	33
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Fenomena Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di desa Bontolangkasa.....	38
C. Aspek Mudarat Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangksa.....	41
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>damamah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلٌ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang dididahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

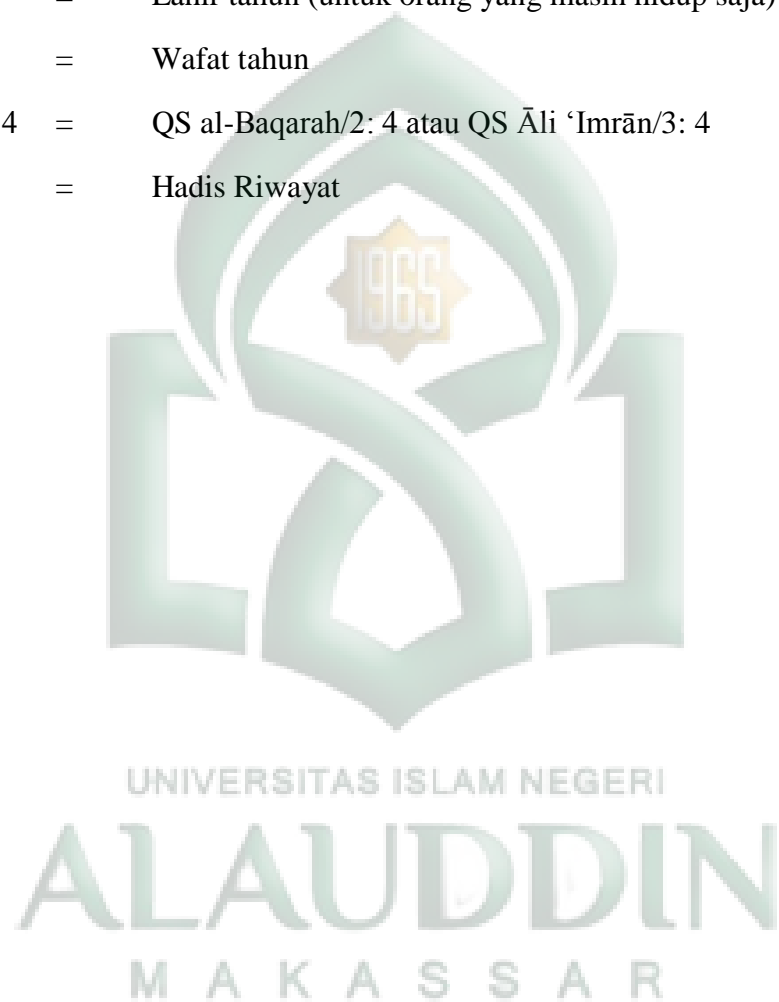
B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Akbar Ibrahim

Nim : 10300114040

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

**Judul Skripsi : Bahaya Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan
Minasatene Kabupaten Pangkep)**

Skripsi ini mengambil permasalahan tentang fenomena pernikahan dini karena paksaan orang tua dan Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua serta pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan dini dan untuk mengetahui Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua serta untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maraknya fenomena pernikahan dini Di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Karena paksaan orang tua disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu factor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, factor sosial budaya, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas dan Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa diantaranya Kelahiran anak premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Child abuse (kekerasan pada anak), Penelantaran anak, Harga diri rendah, Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan Perceraian serta Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena dan Bahaya Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa hukum pernikahan dini dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai hukum islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak(calon suami dan calon istri) tidak ada rasa ridho diantaranya maka hukumnya tidak di perbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan dini bukanlah sekadar kisah sinetron. Kasus pernikahan dini itu nyata terjadi di sekitar kita dengan kuantitas yang terbilang tinggi.

Di Indonesia masalah pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan, batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan. Poin dalam undang-undang tentang perkawinan itu

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7

²Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1

³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), h. 304

bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁴

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia melibatkan perempuan berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan perempuan yang berusia di bawah 15 tahun. Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan melibatkan wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian di urutan selanjutnya antara lain Jawa Barat dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen. Sedangkan provinsi dengan melibatkan perempuan di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen. Pada riset *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila *United National Development Economic and Social*

⁴<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> di Posting Pada Tanggal 22/03/2016.

Affair(UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi. Mengapa isu pernikahan dini menjadi krusial?Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama *Sustainable Development Goals*.Pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030.⁵

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pernah mengatakan bahwa pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya. Menurut Menteri Yohana, negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa dekade ke depan bilamana anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Bukan hanya itu, seringkali pernikahan dini yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian.Ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. Perempuan yang menikah pada usia dini juga akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ia bertumbuh, dan masa-masanya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Sebab, biasanya anak yang menikah dini akhirnya putus sekolah.Mengapa di era yang sudah maju begini masih ada saja pernikahan dini

⁵<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/> di Posting Pada Tanggal 22/03/2016.

atau pernikahan pada usia belia? Ada beberapa alasan, salah satunya mungkin adalah faktor budaya dan tradisi.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah swt. dan petunjuk Rasulullah.⁶ Sebagaimana firman Allah swt. Yang tercantum dalam QS Al-Rumm/30: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan_Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada_Nya dan dijadikan_Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk_Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk_Nya untuk menghasilkan keturunan, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan berperan setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya dalam hal yang positif dalam melakukan tujuan pernikahan itu sendiri.⁸

⁶Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 203.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Cet. 1: Jakarta: Dua Ribu Wisata, 2002), h. 406.

⁸Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h. 9.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan maka sebaiknya harus dibimbing terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga saat ini, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Belum ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah

mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada umumnya ditujukan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari semaksimal mungkin, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dan maksud perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata yang dianggap perlu:

Bahaya adalah sesuatu yang mungkin mendatangkan bencana, kesengsaraan, kerugian dan sebagainya.⁹

⁹<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/bahaya.html> diposting pada tanggal 28 mei 2018.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam hal ini disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Di bawah umur adalah laki-laki atau perempuan yang tergolong masih di bawah umur atau belum dewasa secara hukum.¹¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasa dilakukan oleh pasangan muda mudi dibawah umur 16 tahun. Dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 13 sampai 16 tahun.¹²

Perspektif hukum islam adalah sudut pandang mengenai ketentuan perintah dari allah baik yang wajib, haram, maupun mubah.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilakukan di desa Bontolangkasa kecamatan Minasatene kab Pangkep melalui wawancara langsung pada tokoh yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap penting.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah ini terbagi atas dua, yaitu:

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 40.

¹¹Syamsumarling, *Analisis Terhadap Dispensasi Nikah diBawah Umur*, Skripsi (Makassar: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin 2012), H. 6.

¹²<http://www.depenisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> diposting pada 16 september 2017

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa?
2. Bagaimana Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa.?

C. *Kajian Pustaka*

1. Suhartini (2014) dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2013-2014” hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah pada dasarnya sama dengan uu hanya saja hakim mempunyai criteria sendiri, dalam pelaksanaannya hakim memeriksa dan apabila bukti-bukti telah kuat, dan tidak ada larangan dalam melangsungkan pernikahan maka hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Sartini (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif UU Kesehatan dan Hukum Islam” penulis mengemukakan bahwa efektifitas usia dini yang matang mengadakan pernikahan dini sangatlah penting melihat banyaknya terjadi pernikahan pada usia belia yang rata-rata pada usia belasan yang hanya berdampak buruk meskipun kita ketahui pernikahan dini itu ada sisi negative dan positifnya namun dengan adanya berbagai penelitian kebanyakan berdampak negative dan semua ini akibat banyaknya factor

pendorong pernikahan dini sehingga harus berdampak pada segala aspek , kesehatan, social, kejiwaan dan semuanya akan berujung pada pengadilan untuk bercerai.

3. Muhammad Farid (2015) dalam skripsinya berjudul “Analisi Masalah Mursalah Perjanjian Perkawinan dan Penerapannya Terhadap Anak di Bawah Umur” setelah melakukan pembahasan maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa konsep masalah Mursalah menekankan dalam hukum Islam menekankan kepada kemaslahatan atau kemanfaatannya yang diperoleh seorang mukhallaf. Pernikahan di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun) akan mendatangkan sedikit manfaat atau menghilangkan *development*, *Protection* dan juga akan mengurangi *patripation*. Oleh sebab itu, cara untuk menangani masalh ini adalah dengan menghalangi pernikahan di bawah umur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini karena paksaan di desa Bontolangkasa.
- b. Untuk mengetahui Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :referensi sebagai berikut :

a. Secara teoretis

penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti
- 2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang yang telah diterima dalam perkuliahan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pondasi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEOROTIS

A. *Tinjauan Umum Perkawinan*

1. **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari nikah. Sedangkan menurut bahasa nikah berarti penyatuan, dan dapat diartikan juga sebagai akad atau berhubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikan sebagai berhubungan badan. Al-fara mengatakan; “aN-Nukh” adalah sebutan untuk kelaminan. Disebut sebagai akad karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan; akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab yang berarti hubungan badan. Dikatakan pula bahwa, berpasangan juga merupakan salah satu makna nikah. Karena ia penyebab terjadinya hubungan badan. Sementara itu, al-Farisi mengatakan; jika mereka mengatakan si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang di maksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa ia menikahi isterinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan.¹

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan sendiri maupun bagi masyarakat dan Negara.² Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat. Ikatan perkawinan adalah

¹Hilda, dalam skripsinya berjudul *Dampak Perkawinan Endogami ditinjau dari Hukum Islam*, 2015, h.9.

²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-sembilan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 227

ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar hubungan perdata antara semata manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan di pertanggung jawabkan di akhirat kelak nantinya.³ Pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh dengan tujuan untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasih, tenteram dan bahagia.⁴

a. Definisi Perkawinan dalam Mazhab Hanafi

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara disengaja.

Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu yakni kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

b. Definisi Perkawinan dalam Mazhab Maliki

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam atau lawan jenis tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.

Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri adalah milik suami.

³Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT hidakarya agung, 1981), h.1.

⁴Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2.

c. Definisi Perkawinan dalam Mazhab Syafi'i

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks.

Inti dari definisi ini yakni kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil dan merasakan seluruh manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan yakni akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

d. Definisi Perkawinan dalam Mazhab Hanbali

Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari perkawinan.

Menurut ulama Hanbaliyah, perkawinan adalah akad yang diucapkan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri⁵

a. Rukun Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah atau bagian dari rukun Pernikahan, ada ulama/mazhab yang memandang bahwa suatu hal

⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 57

merupakan bagian dari rukun akan tetapi menurut ulama lainnya hal tersebut merupakan pemberian wajib atau syarat.⁶

Terdapat beberapa pendapat ulama/mazhab tentang bilangan dan penyebutan rukun dalam perkawinan antara lain:

1) Menurut Mazhab Maliki, rukun-rukun perkawinan terdiri atas:

- a) Wali dari pihak wanita,
- b) Adanya mahar
- c) Adanya calon suami,
- d) Adanya calon istri (terbebas dari larangan syariat), dan
- e) Terjadinya akad

2) Adapun menurut Mazhab Syafi'i, rukun-rukun perkawinan antara lain:⁷

- a) Adanya calon suami,
- b) Adanya calon istri,
- c) Adanya wali calon istri,
- d) Adanya minimal dua orang saksi, dan
- e) Terjadinya akad

3) Menurut ulama hanafiah, rukun perkawinan itu hanya terdiri dari ijab dan qabul saja.

4) Sedangkan menurut hambali rukun perkawinan itu terdiri dari tiga bagian, yakni antara lain:

- a) Sighat (ijab dan qabul),
- b) Adanya calon pengantin laki-laki,

⁶Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 12.

⁷Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, h. 13

c) Adanya Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

5) Pendapat secara umum mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yakni sebagai berikut:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali,
- c. Adanya dua orang saksi,
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan, apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, calon pengantin perempuan tersebut bukan perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pengantin pria

- 1) Calon suami beragama islam.

- 2) Jelas bahwa suami itu betul-betul berjenis kelamin laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan tersebut.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- 1) Beragama islam atau ahli kitab.
- 2) Jelas bahwa suami itu betul-betul berjenis kelamin perempuan..
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Halal bagi calon suaminya.
- 5) Mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah.
- 6) Tidak dipaksa ikhtiar.
- 7) Tidak dalam keadaan haji dan umrah.

c. Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu yang menlangsungkan perkawinan maka ijab kabulnya dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali

mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

d. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan dan wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki muslim, baligh, sehat dan adil.

e. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut imam hanafi dan imam hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.

Adapun pendapat lain mengenai syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila.
- 2) Sudah baligh, bukan dari golongan anak-anak.
- 3) Merdeka, bukan budak.
- 4) Beragama islam.
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar dan melihat ijab dan Kabul berlangsung.

B. Tinjauan Mengenai Perkawinan di Bawah Umur (Pernikahan Dini)

1. Pernikahan Dini Menurut hukum Islam

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. “Dini” dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, perkawinan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki

pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tetapi bagi masyarakat sekarang, hal tersebut merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu cepat” istilahnya.

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum islam, seorang anak dikatakan sudah baligh adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki, dan telah *menstruasi* untuk anak perempuan.⁸ Menurut hukum HUKP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa *adalah belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin*, begitu juga dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau pandang dari sudut hukum yang mana.

Dalam hal ini secara tersurat agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Namun demikian, hukum islam secara umum meliputi lima prinsip yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, syekh Ibrahim dalam bukunya al bajuri

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 316

menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui perkawinan. Seandainya agama tidak mensyariatkan perkawinan, niscaya jalur keturunan akan semakin tidak jelas.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan “dini” adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul dipermukaan. Hal tersebut tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Sebagai umat islam, merupakan kewajiban kita untuk merujuk sumber utama dari ajaran islam, yakni al-Qur'an. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau justru melarang perkawinan bagi perempuan di bawah umur? Yang jelas, tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menjawab persoalan di atas, mesti substansi dasarnya adalah keturunan bagi muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Meski demikian, petunjuk al-Qur'an mengenai perlakuan anak yatim itu dapat juga kita terapkan pada anak secara umum seperti firman Allah swt dalam QS Al-Nisa /4: 6 yang artinya :” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang

miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁹

Di samping persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuan terlebih dahulu dengan tujuan agar pernikahan yang akan dilakukan itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan kepada perempuan yang belum dewasa tentu tidak dapat di pertanggung jawabkan , baik secara moral maupun intelektual. Karenanya klaim sejumlah pihak yang menikahi perempuan dibawah umur dengan dalil meneladani sunnah Nabi saw dengan Aisyah masih kanak-kanak itu falid, itu juga tidak bisa serta merta dijadikan pacuan untuk mencontohinya. Tidakkah Nabi saw itu memiliki previlige (hak istimewa) yang hanya diperuntukkan secara khusus untuknya dan tidak untuk ummatnya.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan ialah memenuhi kebutuhan biologis dan menghasilkan keturunan.

Ibnu Syubronah mencoba melepaskan diri dari lingkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (cet. 1: Jakarta: Dua Ribu Wisata, 2002), h.100.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. Al-thalaq/65:4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi baginda Nabi saw dalam usia sangat mudah. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dan wajar di kalangan sahabat pada masa itu.

Bahwa sebagian ulama menyatakan pembolehkan perkawinan dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap dan bahkan diabaikan. Konstruksi yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

2. Pernikahan Dini Menurut hukum nasional

Berdasarkan pasal 45 KUHP dan berdasarkan undang-undang peradilan anak menegaskan bahwa “jika seorang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman” Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, maka pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak dan setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 1¹⁰

Tentang perlindungan anak, mendefinisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹¹

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dengan pengembangan diri.

UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

¹⁰Muhammad Saleh Ridwan, *perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 168.

¹¹Muhammad Saleh Ridwan, *perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 168

Namun mencegah perkawinan di bawah umur dengan mengkriminalisasi perkawinan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Belum ada kekhawatiran yang kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur;
2. Akan menafikan norma agama;
3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentangan dengan tradisi;
4. Serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, upaya meredam meningkatnya perkawinan di bawah umur melalui penegakan hukum, bukan mengkriminalisasi perkawinan tetapi lebih efektif dengan mengaktualisasikan “perzinaan dan hubungan di luar nikah” serta kegiatan pornografi bebas kedalam peraturan perundang-undangan, mengefektifkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda.

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-pihak terkait dalam hal menyikapi perkawinan anak di bawah umur. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia diharapkan bisa menjadi penengah diantara pihak-pihak yang berselisih dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak di bawah umur. Sinergi antara dua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat merupakan jalan keluar

terbaik yang bisa diambil sementara ini agar perkawinan anak di bawah umur bisa dicegah dan ditekan seminimal mungkin keberadaannya di tengah masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsure maslahat. Pemerintah melarang perkawinan usia dini dengan maksud berbagai pertimbangan di atas pula. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternative terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia “matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami dan istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan warahmah
- 2) Suami dan istri hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat antara satu sama lain.
- 3) Suami dan istri hendaknya menghiiasi dengan pergaulan yang harmonis.
- 4) Suami dan istri hendaknya saling menasehati dalam kebaikan.

2. Adab Suami dan Istri

- 1) Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama.
- 2) Seorang istri menjadi musuh bagi suami dalam menaati Allah dan Rasul_Nya
- 3) Hendaknya senantiasa berdo'a kepada Allah swt. Meminta istri yang solehah.
- 4) Diantara kewajiban suami terhadap istri, ialah membayar mahar, memberikan nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), menggaulinya dengan baik, berlaku adil jika beristri lebih satu.
- 5) Orang mukmin yang paling sempurna imamnya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya atau keluarganya.
- 6) Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruknya istrinya.
- 7) Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zalim.
- 8) Suami wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita.
- 9) Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri.
- 10) Suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun.
- 11) Apabila istri tidak menaati suami, maka semua wajib mendidiknya dan membawahnya kepada ketaatan, walaupun secara paksa.
- 12) Jika suaimi hendak meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya.

3. Adab Istri Kepada Suami

- 1) Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin kaum wanita.
- 2) Hendaknya istri menyadari bahwa hak suami setingkat lebih tinggi daripada istri.
- 3) Istri wajib menaati suaminya selama bukan dalam hal kemaksiatan.
- 4) Diantara kewajiban istri terhadap suami ialah:
 - a) menyerahkan dirinya,
 - b) menaati suami,
 - c) tidak keluar rumah, kecuali dengan izin suami,
 - d) tinggal di tempat kediaman suami,
 - e) menggauli suami dengan baik,
- 5) Istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya, walaupun dalam kesibukan.
- 6) Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk menggaulinya, lalu sang istri menolaknya, maka penduduk langit akan melaknatnya apabila suami meridhohnya.
- 7) Istri hendaknya mendahulukan hak dan suami atas orang tuanya. Allah swt mengampuni dosa-dosa seorang istri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya.
- 8) Yang sangat penting istri adalah ridho suami. Istri yang meninggal dunia dalam keridhahan suaminya akan masuk surga.

- 9) Kepentingan istri menaati suaminya, telah disabdakan oleh Nabi saw, “seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya.
- 10) Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya.
- 11) Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu cantik dan kelihatan menarik di hadapan suami.
- 12) Istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapan maupun belakang suami
- 13) Ada empat cobaan berat dalam pernikahannya, yaitu: banyak anak, sedikit harta, tetangga yang buruk, istri yang berkhianat.
- 14) Wanita mukmin hanya diperbolehkan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.
- 15) Wanita dan laki-laki mukmin, wajib menundukan pandangannya mereka dan menjaga kemaluannya.

D. *Macam-macam Wali*

Wali nikah ada lima macam yaitu : wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir

a) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali akrab (dekat) dan wali ab“ad (jauh). Yang termasuk wali akrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kaka atau adik ayah. Jika kaka dan adik ayah menjadi wali dekat yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

b) Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : kepala pemerintahan (shulthan) dan khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan. Apabila tidak ada orang-orang tersebut wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

c) Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si ...(calon istri) dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama kemudian, calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”

d) Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya

e) Wali Mujbir

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya

perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuannya, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekali pun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang ayah keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi wilayat (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- 3) Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hak ijbar menjadi gugur.

Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.¹²

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013),h. 247

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Penelitian ini berlangsung di desa Bontolangkasa kec Minasatene kab Pangkep. Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini sekitar tiga bulan sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil riset.

B. Pendekatan Penelitian

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan masalah ini secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan

peneliti di lapangan. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang berbagai organisasi atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data nanti, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan).

Pengumpulan data berdasarkan data primer dan sekunder yang ada diperoleh dengan berbagai cara. Data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya, tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik:

1. *Library research* (studi kepustakaan)

Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan

pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penelitian tanpa mengubah redaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.

2. *Internet research*

Internet research adalah penelitian menggunakan pemanfaatan teknologi internet. Penelitian dengan cara menelusuri berbagai alamat website yang membahas berkaitan dengan penelitian dan juga mencari informasi tambahan tentang objek penelitian. Segala yang diperoleh di download kemudian dilakukan penyuntingan dan dikutip sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Field research*

Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontrak objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik *field research* antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk

memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

b. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi yang telah disiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikanto, instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Oleh karena untuk penelitian lapangan yang meliputi observasi

dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses penggambaran keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Untuk menghasilkan data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi adalah menghilangkan kalimat atau kata yang tidak diperlukan dalam hasil data yang diperoleh.

2. Display data

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian

dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

3. Analisis perbandingan

Dengan teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengujian keabsahan data melalui data sumber data dari para ahli atau tokoh. Pengujian keabsahan data melalui sumber yaitu dengan melakukan pengabsahan dari referensi lain yang berbeda dari referensi yang digunakan sebelumnya, sedangkan pengujian keabsahan data ahli atau tokoh yaitu melakukan keabsahan dan melalui seorang ahli atau tokoh yang dimana berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Adapun Lokasi penelitian penulis di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Minasatene merupakan kecamatan dengan luas 76,48 Km² dengan 8 Kelurahan/ Desa antara lain:

- a. Kelurahan/ Desa Bontolangkasa
- b. Kelurahan/ Desa Kabba
- c. Kelurahan/ Desa Panaikang
- d. Kelurahan/ Desa Bontokio
- e. Kelurahan/ Desa Biraeng,
- f. Kelurahan/ Desa Minasatene
- g. Kelurahan/Desa Kalabbirang
- h. Kelurahan/ Desa Bontoa.

Adapun batas-batas administasinya antara lain :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Bungoro
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Balocci
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Maros
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Pangkajene

Jumlah penduduk di Kecamatan Minasatene pada tahun 2015 sebanyak 35350. Penduduk perempuan sebanyak 18.271 dan penduduk laki-laki sebanyak 17.079 dengan sex ratio adalah 93.:

Kelurahan/desa Bontolangkasa memiliki jumlah penduduk sebesar 4.381 jiwa.

Secara geografis kelurahan/desa Bonto Langkasa termasuk dalam wilayah kecamatan Minasatene kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 10,47 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sibatua dan desa Kabba
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Maros
- c. Sebelah Timur : Desa Kabba / Desa Panaikang
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sibatua

Jarak ibu kota kelurahan/desa Bonto Langkasa ke ibukota Kecamatan 5 km dan Jarak ibu kota kelurahan ke ibukota Kabupaten 8 km.

Adapun untuk mata pencaharian masyarakat Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep mayoritas bergerak dibidang Pertanian dan Tambak.

B. Fenomena Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Desa Bontolangkasa kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Banyak nenek moyang terdahulu yang menikahi gadis dibawah umur. Bahkan jaman dahulu pernikahan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan

yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut “perawan tua”. Dalam hal ini, para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak perempuannya dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, sosial, dan anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Rata-rata para orang tua menginginkan pernikahan anak perempuannya dengan cara dijodohkan dengan laki-laki pilihan mereka yang relative lebih tua dan sudah mapan, tanpa meminta persetujuan dari anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut menikah dibawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan lain mengapa orang tua ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah mereka menganggap dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat, maupun undang-undang. Oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandasi oleh moral, etika dan agama. Kedewasaan calon suami istri harus benar-benar sesuai dengan ajaran agama maupun peraturan dalam perundang-undangan, sebab hal ini menjadi salah satu factor penting dalam pernikahan agar nantinya rumah tangga yang dibangun menjadi sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Oleh karena itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria telah berusia 19 Tahun dan pihak istri berusia 16 Tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum

mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5. Dalam pandangan agama dan undang-undang perkawinan mengatakan bahwa wali nikah menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya suatu pernikahan. Seorang gadis apabila hendak melakukan pernikahan maka harus mendapat izin dari walinya terlebih dahulu. Orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa selama ada alasan yang membenarkannya.

Seperti yang terjadi di desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, dimana pernikahan dini sangat marak sekali terjadi. Pada umumnya ketika seorang gadis telah menginjak usia 14-15 Tahun sebagian orang tua di di desa Bontolangkasa telah mempunyai rencana untuk menjodohkan anak gadisnya sesuai dengan yang diinginkannya. Penduduk yang juga mempunyai anak laki-laki juga mencari pasangan yang cocok untuk dijodohkan dengan anak laki-lakinya. Maka yang pertama dilihat adalah saudaranya, teman terdekat dari orang tua tersebut, jika belum dapat juga maka bisa dijodohkan dengan tetangganya. Umumnya orang tua di desa Bontolangkasa menjodohkan anaknya dengan saudara jauhnya atau anak dari teman orang tua tersebut, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan mereka semakin erat dan tidak putus. Bagi orang tua yang menjodohkan anaknya dengan teman orang tuanya tujuannya iyalah agar tali silaturahmi semakin akrab dan tidak sebetas teman tapi harus lebih dekat.¹

¹.Hasil Wawancara dengan Sarifuddin, *Tokoh Masyarakat Desa Bontolangkasa*. Pada Tanggal 19 Agustus 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat di Desa Bontolangkasa, factor-faktor yang melatar belakangi fenomena maraknya pernikahan dini karena paksaan orang tua diantaranya:

- a. factor ekonomi
- b. tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya
- c. factor sosial budaya
- d. kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas.²

C. Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep penulis menemukan beberapa dampak negatif akibat pernikahan dini karena paksaan orang tua.

Dampak negative pernikahan dini secara umum akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak, Tidak dipungkiri bahwa pasangan suami istri pernikahan dini tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut dikarenakan belum benar-benar siap fisik dan mental karena keduanya masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan sifat keegoisan yang tinggi.

a) Dampak terhadap suami istri

Terjadinya pernikahan dini sering tidak diperhatikan dampak atau akibat yang terjadi. Setelah adanya pernikahan yang penting tujuannya tercapai yaitu hidup bersama dengan pasangan yang telah dijodohkan oleh orang tua.

².Hasil Wawancara dengan Muh. Halim, *Tokoh Masyarakat Desa Bontolangkasa*. Pada Tanggal 19 Agustus 2018.

Seperti hal yang di sampaikan oleh Dg. Juna imam Desa Bontolangkasa bahwa banyak orang yang melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan kehidupan yang akan dijalani setelah menikah. Padahal dengan adanya pernikahan berarti mereka harus siap menanggung segala resiko yang akan terjadi, dari mengurus masalah ekonomi, masalah anak-anak mereka, bahkan saling mengurus antara suami dan istri.³

Menurut Badrah Wati pada saat menikah berusia 15 Tahun dengan Ramadan yang pada saat menikah berusia 21 Tahun. Awalnya mereka berdua belum siap secara material maupun immaterial tetapi karena paksaan dari orang tua akhirnya mereka menikah atas dasar perjodohan. ssetelah mereka menikah kehidupan rumah tangga tidak semudah dibayangkan seperti sebelumnya, dimana setelah menikah mereka membutuhkan banyak biaya untuk keperluan sehari-harinya sehingga hal ini sering menjadi masalah dalam rumah tangganya. Hampir setiap hari pasangan ini cekcok karena masalah ekonomi hal ini membuat kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.⁴

Dari contoh kasus tersebut pernikahan di usia dini dapat berakibat kurang baik terhadap pasangan suami istri, Karena sifat antara mereka masih kekanak-kanakan dan keegoisan yang tinggi

b) Dampak terhadap orang tua masing-masing

Menurut Dg. Juna imam Desa Bontolangkasa, rendahnya pendidikan yang didapat yang rata-rata hanya tamat sekolah dasar (SD), maka para pasangan suami

³Hasil Wawancara dengan Dg. Juna, *imam Desa Bontolangkasa*. Pada Tanggal 19 Agustus 2018

⁴Hasil Wawancara dengan Badrah Wati, *Masyarakat yang Menikah di Usia Dini*. Pada tanggal 20 Agustus 2018

istri pernikahan dini kurang memperhatikan keharmonisan terhadap orang tua "mertua" masing-masing, mereka hanya mengalah jika orang tua memarahinya.⁵

Seperti yang terjadi pada pasangan Marwah pada saat menikah berusia 14 Tahun dengan Halim yang pada saat menikah berusia 18 Tahun, mereka sering bertengkar dan jika bertengkar sang istri pulang kerumah orang tuanya untuk mengadu.⁶ Maka orang tuanya datang kebesan menjelaskan perselisihan yang mereka alami. Jika mereka sedang bertengkar maka mereka akan mengadukan pada orang tua masing-masing, hal ini membuat permasalahan semakin rumit. Masing –masing orang tua akan membela anaknya sendiri, sehingga hubungan antar besan akan menjadi renggang.

Kasus yang terjadi pada pasangan ini bukan contoh yang baik. Karena setiap mereka bertengkar pasti akan mengadu kepada orang tua masing-masing. Hal ini dikarenakan jalan pikiran antara mereka belum dewasa dan tidak tahu cara memecahkannya, sehingga orang tua merekalah yang akan mendamaikan. Seharusnya jika pasangan mengalami pertengkaran, alangkah baiknya diselesaikan antara mereka saja dan tidak melibatkan orang tua masing-masing.

Secara umum perselisihan suami istri pada umumnya disebabkan hal-hal yang utama diantaranya adalah perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara sistematis kepada istrinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak menyenangkan dan kehilangan keharmonisan serta factor

⁵Hasil Wawancara dengan Dg. Juna, *imam Desa Bontolangkasa*. Pada Tanggal 19 Agustus 2018

⁶Hasil Wawancara dengan Marwah, *Masyarakat yang Menikah di Usia Dini*. Pada tanggal 20 Agustus 2018

penyebab lainnya itu kurangnya pengetahuan yang didapat pasangan suami istri akan menimbulkan pertengkaran atau perceraian.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk satu keluarga yang akan dapat melanjutkan sebuah keturunan. Sebelum masuk pada tahap pernikahan biasanya harus melewati proses, yaitu:

- a. pengenalan antar kedua pihak keluarga
- b. melamar
- c. pertunangan
- d. melaksanakan pernikahan

Proses pengenalan yang mendalam antar pasangan dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan akan semakin mengakrabkan kedua keluarga maupun dari kedua calon yang akan menikah. Setiap keluarga dibangun dalam suatu ikatan pernikahan yang diresmikan oleh pemerintah dan agama.

Pernyataan ini diperkuat dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, maka seluruh seluk beluk mengenai pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Dengan

berlakunya Undang-undang pernikahan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal pernikahan di Indonesia.

UU Perkawinan juga mengatur tentang usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan dengan alasan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Makna perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung atau ikatan psikologi. Antara suami dan isteri harus ada ikatan saling cinta satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam pernikahan. Ikatan saling cinta ini akan mengikat satu dengan yang lain sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menjaga di antara seluruh anggota keluarga. Jika sebuah pernikahan dilaksanakan karena sebuah rasa terpaksa, maka sangat besar kemungkinan sering terjadi konflik pada rumah tangga.

Konflik yang timbul itu bisa memicu terjadinya kekerasan yang mungkin akan berujung pada perceraian. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang bermasalah sering mengakibatkan perceraian. Tidak menutup kemungkinan pula pada pernikahan dini yang bisa saja terjadi karena paksaan dari pihak orang tua. Kenyataan menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini semakin meningkat baik di desa maupun di kota. Seringkali pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan, banyak menimbulkan masalah karena kurangnya kesiapan secara psikis dan fisik sehingga menimbulkan konflik di dalam bahtera

rumah tangga. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Pernikahan usia dini akan memperpanjang masa reproduksi seorang wanita, pada aspek kesehatan reproduksi memberi kesempatan dan peluang yang lebih sering, untuk hamil, melahirkan dan akan mempunyai jumlah anak yang banyak dan akan berdampak pada resiko kehamilan dan persalinannya. Pernikahan dini memberi dampak negatif, diantaranya :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- c. Rapuhnya ketahanan keluarga
- d. memberi dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak

Rendahnya ketahanan keluarga merupakan dampak dari pernikahan usia dini, ketidakmampuannya secara ekonomi dan secara fisik belum terkendali emosionalnya membawa akibat buruk terhadap ketahanan keluarga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan usia dini berdampak kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kelahiran anak premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)
- b. Child abuse (kekerasan pada anak)

- c. Penelantaran anak
- d. Harga diri rendah
- e. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga
- f. Perceraian

Adapun Dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental yakni:

1. Neoritis Depresi

Depresi dalam tingkatan berat atau neoritis depresi karena pernikahan dini bisa terjadi di kondisi kepribadian yang berbeda. Untuk kepribadian introvert atau tertutup, maka membuat orang tersebut lebih menarik diri dari pergaulan, lebih pendiam, tidak ingin bergaul bahkan sampai menjadi orang schizoprenia atau dikenal juga dengan gila.

Sedangkan ciri ciri depresi berat dalam kepribadian ekstrovert atau terbuka akan menyebabkan orang tersebut untuk melakukan banyak hal aneh untuk melampiaskan rasa marah. Dari segi psikologi, kedua bentuk depresi ini sama sama berbahaya dan sulit dibedakan kadarnya pada remaja pria atau wanita untuk mengendalikan emosi dalam pernikahan dini.

2. Timbul Konflik Berujung Perceraian

Dunia remaja yang sebenarnya masih disibukkan dengan menata hidup dan diri sebenarnya membuat seorang remaja tidak siap untuk sebuah perubahan dalam pernikahan dini. Dilihat dari segi positif, ia akan mencoba dan berusaha untuk bisa bertanggung jawab dari perbuatannya, namun kestabilan emosi yang baru bisa dibentuk pada usia 24 tahun dimana seseorang sudah dikatakan dewasa menyebabkan seorang remaja yang melakukan pernikahan dini masih terbilang

labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian dan akan banyak dampak perceraian bagi anak perempuan.

3. Pendidikan Terhambat

Seperti yang kita ketahui jika seseorang melakukan pernikahan dalam usia muda, maka tentu akan berdampak pada urusan pendidikan. Sebagai contoh, jika seorang remaja berkeinginan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, maka tidak bisa tercapai karena motivasi belajar yang dimiliki mulai menurun karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan sehingga proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan.

5. Timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari penelitian UNICEF tahun 2005 membuktikan jika angka kekerasan dalam pernikahan dini sangat tinggi yakni sebesar 67% dibandingkan dengan 47% perempuan dewasa yang menikah yang terjadi karena gangguan psikologis remaja. Hal ini terjadi karena para anak perempuan yang menikah dengan laki laki lebih tua tidak mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi dan akhirnya timbul kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut dibandingkan dengan pasangan dewasa.

6. Banyak Anak Terlantar

Pasangan yang menikah dalam usia terlalu muda seringkali juga akan melahirkan banyak anak sebab tidak menjalani keluarga berencana dan tidak memahami dengan baik tentang berbagai alat kontrasepsi. Ini mengakibatkan

banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya dan ditelantarkan oleh orang tua atau bahkan sampai diberikan pada orang lain. Hal yang semakin ironis terjadi adalah orang tua tidak mengerti apa akibat dari perbuatan yang sudah mereka lakukan namun tetap saja melahirkan anak kembali meski sudah mengetahui jika kebutuhan anak tidak mungkin tercukupi.

7. Tidak Memiliki Jaminan Masa Depan

Dampak selanjutnya dari pernikahan dini adalah masa depan yang kurang terjamin berdasarkan fakta psikologis remaja. Dari hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Anak atau UNICEF di Itali membuktikan jika perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan dipenuhi dengan ketidakpastian dan memiliki banyak risiko yang tidak terhitung banyaknya.

8. Gangguan Mental

Dari penelitian dalam Jurnal Pediatrics juga memperlihatkan jika remaja yang menikah sebelum memasuki usia 18 tahun akan meningkatkan risiko terkena gejala gangguan mental pada remaja bahkan mencapai 41%. Gangguan mental yang biasanya terjadi pada pasangan muda diantaranya adalah depresi, gangguan disosiatif atau kepribadian ganda, kecemasan dan juga trauma psikologis seperti PTSD.

9. Kecanduan

Pernikahan pada usia terlalu muda bahkan bisa menimbulkan masalah psikologis seperti kecanduan baik dari narkoba, minuman keras, rokok atau judi. Kecanduan ini lebih sering ditemui dalam pasangan muda karena usia remaja

membuat mereka tidak mengerti dan tidak bisa menemukan cara yang sehat dan baik untuk meluapkan emosi dalam psikologi atau mencari distraksi saat sedang mengalami stress.

10. Tekanan Sosial

Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda.

Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Akhirnya, jika pasangan tersebut tidak bisa memenuhi tuntutan sosial, maka mereka akan dikucilkan dan dicap buruk oleh warga di sekelilingnya dan akan semakin sulit mendapatkan dukungan dari orang sekitar saat membutuhkan.

11. Timbul Pekerja Anak

Dengan menikah pada usia yang masih muda bahkan masih bersekolah, membuat remaja akan mengakhiri pendidikannya karena sudah harus menjalankan tugas seperti layaknya orang berumah tangga, untuk itu akan terjadi banyak pengangguran atau hanya bisa bekerja pada bidang yang kurang memadai dan tanpa kontrak yang tentunya sangat mengganggu psikologi remaja.

Saat sudah harus menjalani rumah tangga pada usia dini khususnya pria, maka mereka sudah harus bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan pendidikan belum terlalu tinggi.

12. Kanker Leher Rahim

Wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun akan lebih berisiko terkena kanker leher rahim sebab keadaan sel sel leher rahim belum matang benar sehingga saat terpapar Human Papiloma Virus atau HPV, maka pertumbuhan sel akan menyimpang dan menjadi sel kanker.

13. Penyakit HIV

Seorang anak yang menikah muda dari penelitian Baru tahun 2007 juga mengatakan jika memiliki risiko pada penyakit kelamin dan HIV yang lebih tinggi. Hal ini terjadi sebab mereka tidak mempunyai kekuatan dan cara untuk berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan perkawinan dan ciri-ciri pubertas belum selesai dengan sempurna. Mereka juga tidak bisa menolak hubungan seks yang dipaksakan suami sehingga akhirnya terjadi HIV AIDS sebab vagina belum cukup kuat dan lebih mudah terluka.

14. Meningkatkan Angka Kematian Anak

Dari penelitian juga menunjukkan jika seorang ibu di bawah umur akan cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki peningkatan sebesar 60% mengenai kematian pada bayi dan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi.

15. Kontrol Diri Masih Lemah

Dampak terakhir dari pernikahan dini adalah fakta jika remaja yang masih belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk sehingga sering tersesat dengan berbagai perilaku salah seperti perselingkuhan. Hal ini

terjadi karena kontrol diri yang masih sangat lemah sebab usia remaja adalah masa mereka untuk mencari jati diri dan mengeksplorasi berbagai hal yang belum pernah dialami sebelumnya.

16. Dampak Psikologi

Dari segi psikologi khususnya sosial, pernikahan dini akan mengurangi keharmonisan keluarga sebab emosi remaja yang masih labil, meningkatkan tanda tanda stress, gejala darah muda yang masih membara dan cara berpikir yang belum matang dengan benar.

17. Perilaku Seksual Menyimpang

Perilaku seksual menyimpang yang merupakan kesenangan berhubungan seks dengan anak di bawah umur juga bisa terjadi karena pernikahan yang dilakukan terlalu cepat. Hal ini bisa menjadi kebiasaan atas dasar pernikahan yang juga dilakukan pada usia terlalu muda sehingga mengembangkan perilaku seksual menyimpang tersebut.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa.

Islam menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah yakni menikah. Namun selain itu Islam pun memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya ketika hendak melakukan perkara atau perbuatan yang memiliki kandungan hukum seperti melaksanakan pernikahan. Diantaranya ialah rukun dan syarat sebuah pernikahan. Dalam hal ini, rukun dan syarat sebuah pernikahan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Namun jika terjadi sebuah pernikahan

yang berseberangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka Islam melarang hal tersebut.

Salah satu rukun nikah ialah pertemuan ijab dan qabul dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan salah satu syarat sebuah akad ialah tamyyiz atau dewasa. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki yang sudah tamyyiz atau baligh menurut Islam yang bertindak sebagai penerima pernyataan (qabul) dan pihak perempuan yang diwakilkan oleh wali sebagai pemberi pernyataan (ijab) karena perempuan tidak bisa menikahkan diri kecuali dengan walinya, Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW. Bersabda yang artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”⁷

Berdasarkan hasil interview atau temuan penelitian terhadap penyebab pernikahan dini karena paksaan orang tua yang terjadi di Desa Bontolangkasa, diantaranya :

- a. Tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini orang tua berpengaruh besar dalam menentukan pernikahan anak-anaknya, bahkan orang tua dapat memilih pasangan hidup untuk anaknya yang mereka inginkan
- b. Faktor ekonomi dari sebuah keluarga, Faktor ini sangat berpengaruh ketika sebuah keluarga berada digaris kemiskinan yang menjadi alasanya adalah ketika anak-anak mereka dinikahkan, maka beban yang dihadapi sebuah keluarga akan sedikit berkurang.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014), h.101

- c. Faktor pengawasan orang tua terhadap dampak-dampak negative dari globalisasi (pergaulan bebas). Pergaulan bebas menjadi sebuah ketakutan bagi orang tua. Mereka takut ketika anak-anak mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas. Ini yang menyebabkan beberapa orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka walaupun usianya masih dibawah umur.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan diterangkan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁸ ini menjelaskan bahwa pentingnya seorang wali dari pihak mempelai perempuan sehingga menjadi sebuah rukun terjadinya pernikahan. Tanpa adanya wali, maka pernikahan dianggap batal karena rukun dalam pernikahan tidak terpenuhi.

Eksistensi perwalian dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatan yang tinggi dari ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan.

Sebagai mana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, dalam (Q.S An-Nur : 32) yang artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 118.

Hadist Rasulullah SAW pernah menjelaskan yang artinya “Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas”(H.R. At-Turmidzi).

Dalam hadis ini mengandung dua penafsiran yaitu:

- 1) Subtansi hukum Syariah, karena substansi yang ada yakni menggambarkan pelaksanaan perjanjian (pernikahan) yang dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum Syari’ah. Hal ini telah dijelaskan dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam bahwa keberadaan wali merupakan bagian dari rukun dan syarat sebuah pernikahan.
- 2) Keabsahan hukum, maka suatu pernikahan tanpa seizin wali adalah batal. Maka diperoleh pentingnya keberadaan wali bagi pelaksanaan pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal demi hukum.

Tidak adanya wali dalam sebuah pernikahan dapat mengakibatkan batalnya pernikahan atau dalam hukum Islam disebut juga fasakh.⁹ Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungannya perkawinan. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah ini diantaranya adalah diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya (yang mewakili mempelai perempuan), suami istri masih kecil. Setelah dewasa kemudian ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya.

⁹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahar 2, cet-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 73.

Sebagai salah satu bentuk perwalian yang dikenal dalam khazanah hukum Islam, wali mujbir menjadi salah satu pilihan yang dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang sesuai. Secara definitif, wali mujbir atau yang disebut sebagai al-Wilayah al-Ijbariyah merupakan orang yang mempunyai wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.

Definisi wali mujbir dapat memunculkan pemahaman bahwa wali mujbir identik dengan kawin paksa, yaitu praktek menjodohkan anak perempuan dengan orang lain dengan tanpa memperhatikan keinginan dan kesedian anak perempuan. Padahal dalam tataran normatifnya, praktek wali mujbir identik tidak dapat disamakan dengan kawin paksa. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Kasani dalam Abda' as-San'ani seperti yang dikutip oleh Muhammad Husain yang membedakan antara definisi Ikrah dan ijbar. Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa tanggung jawab.

Pemahaman akan makna ijbar tersebut dapat memberikan batas yang jelas antara wali mujbir dengan kawin paksa. Wali mujbir lebih merupakan wujud kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak perempuan untuk menikahkan dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksa kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hanyalah hak menikahkan.

Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab dengan asumsi dasar bahwa perempuan tersebut belum atau tidak memiliki kemampuan bertindak

sendiri. Sehingga dalam pengertian ini, hak ijab seorang ayah terhadap putrinya harus dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki calon suaminya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya
- c. Calon suami haruslah sekufu (setara/sebanding).
- d. Mas kawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni maskawin perempuan lain yang setara.
- e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan.

Jika mengacu pada ketentuan diatas, maka secara normatif tujuan dari praktek wali mujbir ini juga memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk memberikan arahan kepada anak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Secara umum dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan ijab, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan problem pemecahan dalam keluarga Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam Al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung didalamnya. Maka, Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam Islam adalah mubah atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, jika pernikahan tersebut karna dipaksakan dan diantara kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) tidak terdapat rasa ridho diantarnya maka hukum pernikahan dini karna paksaan tersebut tidak diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis adalah:

1. Maraknya fenomena pernikahan dini Di Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Karena paksaan orang tua disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu factor ekonomi, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya, factor sosial budaya, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas
2. Aspek Mudarat Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa Bontolangkasa diantaranya Kelahiran anak premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Child abuse (kekerasan pada anak), Penelantaran anak, Harga diri rendah, Ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Perceraian
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena dan Bahaya Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua di Desa Bontolangkasa hukum pernikahan dini dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai hukum islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak(calon suami dan calon istri) tidak ada rasa ridho diantaranya maka hukumnya tidak di perbolehkan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sudah tentu harus melakukan perbaikan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus mengambil peran dengan merevisi undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini sudah ketinggalan zaman dan akan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk ikut menghapus peraktek pernikahan dini pada tahun 2030.
2. kepada seluruh masyarakat Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep perlu kiranya merubah pola pikir yang masih mereka pertahankan, perlu adanya perubahan paradikma dalam mendidik dan menikahkan anaknya, walaupun orang tua mempunyai hak untuk memaksa, tetapi alangkah baiknya jikalau semua hal dilakukan dengan jalan musyawarah agar tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai dengan baik.
3. Masyarakat harus paham dampak negative dari pernikahan dini. Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan dini akan memupus semua impian para pelaku, terutama yang dikorbankan adalah pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Dua Ribu Wisata. Kementrian Agama RI Jakarta, 2002.
- Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh munakahat*. Jakarta: prenada media, 2003.
- Hilda dalam skripsinya, *Dampak Perkawinan Endogamy Ditinjau dari Hukum Islam*, 2015.
- <http://www.depenisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> diposting pada 16 september 2017
- <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/bahaya.html> diposting pada tanggal 28 mei 2018.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-sembilan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Muhammad Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak* Cet-3. Jakarta: AMZAH, 2014.

- Rahman Bakri A dan Ahmad Sukardja 1, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT hidakarya agung, 1981.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Syamsumarling, *Analisis Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, Skripsi. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.





Wawancara dengan Sarifuddin, Tokoh Masyarakat Desa Bontolangkas. Pada tanggal 19 Agustus 2018.



Wawancara dengan Muh. Halim, Tokoh Masyarakat Desa Bontolangkasa. Pada Tanggal 19 Agustus 2018



Wawancara dengan Dg. Juna, Imam Desa Bontolangkasa. Pada Tanggal 19 Agustus 2018



Wawancara dengan Badrawati, Masyarakat yang Menikah di Usia Dini. Pada Tanggal 20 Agustus 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AKBAR IBRAHIM, lahir di PANGKEP Pada tanggal 28 MEI 1996. Anak pertama dari Enam bersaudara, putra dari pasangan bapak Ibrahim dan Hj. Hasbiah. Penulis menyelesaikan pendidikan di MIN Bontolangkasa Pangkep 2002 sampai tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Mangkoso MTS Pa thonronge tahun 2008 sampai tahun 2011 dan Kemudian melanjutkan Sekolah di Pesantren MA Nahdlatul Ulum Soreang Maros di Tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Tepatnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), adapun organisasi yang pernah di masuki oleh penulis adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R